

KAJIAN TEORITIS PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

Masykur¹

Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Borobudur

ABSTRAK

Kabupaten Sintang termasuk wilayah yang mengalami pengembangan cukup pesat. Berbagai fungsi kawasan berkembang pada wilayah administrative Kabupaten Sintang. Guna mengantisipasi pengembangan wilayah yang berkelanjutan diperlukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Untuk mendukung kegiatan penyiapan rencana tata ruang wilayah yang tepat sasaran dan dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan diperlukan kajian teoritis terkait pengembangan wilayah, dimana berbagai teori bagi pengembangan wilayah yang mungkin diterapkan dalam perencanaan wilayah khususnya bagi Kabupaten Sintang.

Kata kunci : pengembangan wilayah, Kabupaten Sintang.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang, awalnya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sintang serta memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan pertemuan tiga aliran sungai dan merupakan wilayah perbatasan atau **beranda depan** negara. Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi

Kemajuan-kemajuan dan kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang dan meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten Sintang, telah menimbulkan berbagai masalah dalam perkembangan wilayah. Permasalahan yang langsung dapat dirasakan adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan permukiman, industri, pertambangan serta kebutuhan sarana prasarana penunjang lainnya telah berakibat pada makin tingginya kecenderungan adanya alih fungsi penggunaan lahan.

Untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas bagi para *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Sintang perlu disusun sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang. **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)** sebagai matra ruang. dimaksud merupakan pedoman dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang.

¹ Dosen Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Jakarta

Pedoman kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam perkembangan penataan ruang di Kabupaten Sintang, sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Sintang telah menyusun draft RTRW Kabupaten Sintang, namun demikian seiring dengan perjalanan waktu diperlukan penyesuaian baru. Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat 2 (*dua*) tahun terhitung sejak UU ini diberlakukan

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pembuatan **legislasi** tentang 'Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang sebagai sarana perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan menjadi sangat strategis adanya.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai perkembangan wilayah di Sintang terkait dengan pentingnya segera melaksanakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Permasalahan yang muncul berkenaan dengan tumpang tindih fungsi lahan , konflik berbagai kepentingan dan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Kajian Teoritis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, bertujuan

1. Terumuskannya kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sintang
2. Terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah Kabupaten Sintang.

Kegunaan Kajian

Kegunaan kajian Memberikan Gambaran kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2031.

Disamping itu Kegunaan Terkendalinya pembangunan di wilayah Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

4. Metode

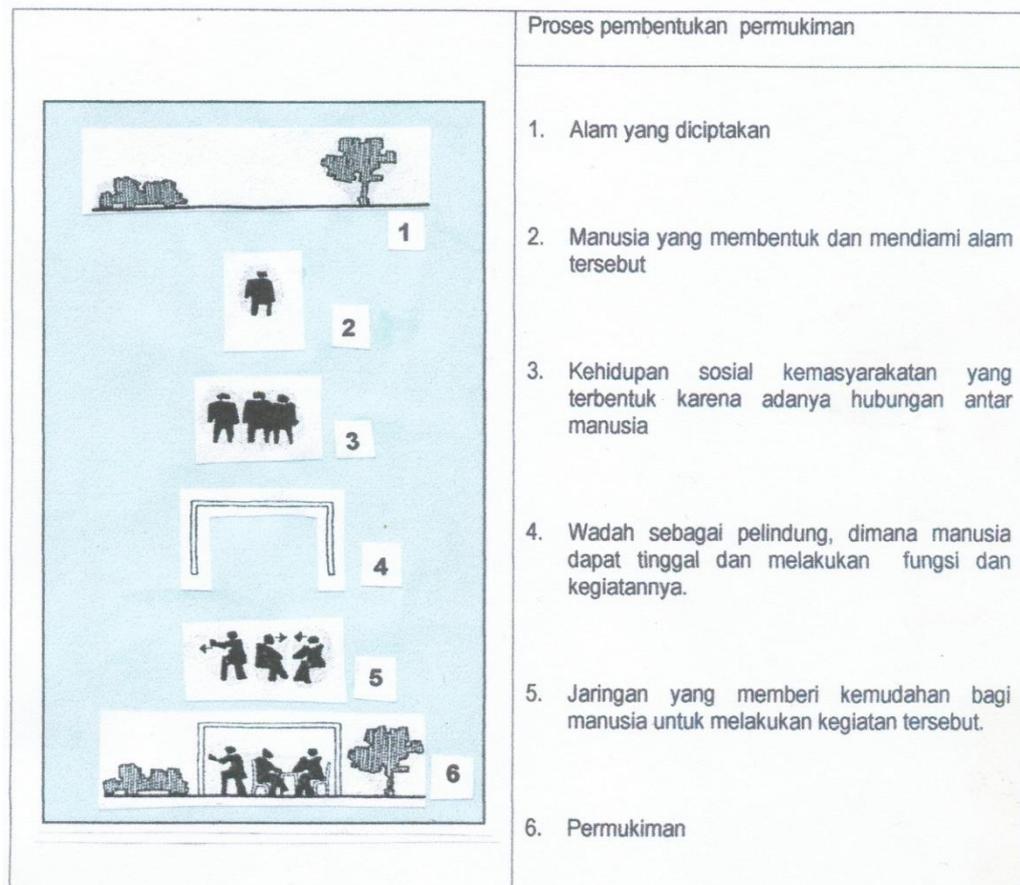
Penulisan kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Data dan informasi diperoleh dari literatur, Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2014-2034;

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMIRIS

Bagian ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Teori Ekistik

Proses pembentukan permukiman (kota) menurut Doxiadis mencakup lima faktor yaitu; alam, manusia, masyarakat, perlindungan dan jaringan prasarana. Alam merupakan merupakan faktor dasar dalam pembentukan permukiman, kemudian manusia mendiami alam tersebut, secara bersama membentuk suatu kelompok masyarakat. Tahap selanjutnya manusia membentuk hunian untuk berlindung. Jaringan komunikasi sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi hubunga antar masyarakat. Terbentuklah permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana menjadi kota.



Gambar 1. Proses Pembentukan Permukiman

2. Konsep kutub Pertumbuhan

Konsep perkembangan dari atas atau lebih populer disebut sebagai konsep pusat pertumbuhan (*growth pole*) merupakan gagasan Perroux, yang menjelaskan mengenai perkembangan aktivitas ekonomi, yang kemudian, berkembang menjadi suatu konsep atau pendekatan perencanaan ruang.

Perroux menekankan perlunya suatu perubahan struktural agar perkembangan ekonomi terhindar dari keadaan yang stasioner. Menurut Perroux, pada dasarnya pertumbuhan adalah efek dari inovasi. Dengan inovasi didapat produk baru yang lebih baik yang dapat menggantikan produk lama. Dengan demikian, terjadi perkembangan dengan munculnya industri-industri baru, menggantikan yang lama. Industri baru berkembang lebih cepat, berkembang di kota-kota yang lokasinya paling baik untuk perkembangan industri tersebut. Di sekeliling industri tumbuh aktivitas lain yang berkembang lebih cepat dari aktivitas di lokasi lainnya (pusat pertumbuhan)

3. Konsep Perkembangan Agropolitan

Perkembangan agropolitan adalah bentuk lain dari konsep pengembangan dari bawah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh **John Friedman dan Mike Doulas** pada tahun 1978. Menurut Friedman, tekanan pada sektor pertanian / perdesaan ini disebabkan oleh penerapan konsep pengembangan dari atas menyebabkan pertumbuhan PDB (GNP) yang pesat. Akan tetapi diiringi dengan terabaikannya Perdesaan, adanya migrasi serta pendapatan dari desa ke kota. Mayoritas penduduk desa yang migrasi ke kota hanya mendapat pekerjaan yang rendah dalam sektor perdagangan dan jasa.

Studi yang dilakukan Friedman menunjukkan bahwa penghasilan penduduk perdesaan di negara India, Indonesia, Malaysia, Korea dan Thailand jauh lebih kecil 40 persen dari rata-rata penduduk di perkotaan.

Dengan alasan tersebut di atas Friedman mengajukan alternatif lain dalam konsep pengembangan, yaitu mengutamakan perkembangan pada kawasan perdesaan.

Tujuan dari pendekatan agropolitan adalah penguatan ekonomi wilayah perdesaan, penguatan ekonomi wilayah harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu:

- a. Penguatan ekonomi wilayah haruslah dengan jalan mendiversifikasi ekonomi wilayah, salah satu cara adalah mengembangkan tanaman pertanian bahan makanan jika pada saat ini tanaman utamanya adalah tanaman industri dan sebaliknya
- b. Perkembangan fisik yang maksimal akan tetapi tetap dibatasi oleh keperluan untuk konservasi. Pemanfaatan SDA berbeda dengan pemanfaatan sumberdaya alam dalam pendekatan pembangunan dari atas yang mengeksploitasi secara maksimal, dalam konsep agropolitan alam diperlakukan lebih hati-hati.
- c. Melebarkan Pasar Regional dan interregional
- d. Berpegang pada prinsip membiayai sendiri
- e. Mempromosikan pembelajaran sosial

Peran pemerintah dalam perkembangan distrik agropolitan.

Pertama, peran proteksi, pemerintah melindungi agar suatu distrik agropolitan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan dari dunia luar.

Kedua peran perkembangan, dengan peran perkembangan, pemerintah mengkoordinasikan baik perubahan struktural maupun pertumbuhan serta merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang penting bagi suatu distrik agropolitan yang berada di luar kemampuan distrik agropolitan, merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang mereka rancang sendiri.

Ketiga peran sebagai pengatur (*regulator*) agar perkembangan suatu distrik agropolitan tidak menyebabkan gangguan terhadap distrik agropolitan lainnya atau wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Jadi, walaupun suatu agropolitan didorong untuk berdiri sendiri, tetapi peran Pemerintah terhadap pertumbuhannya tetap ada (Friedman dan Weaver, 1979;203).

4. Analisis Gravitasi

Hukum gravitasi menerangkan bahwa “besarnya kekuatan tarik-menarik antara 2 benda adalah berbanding terbalik dengan jarak dua benda pangkat dua. Tarik menarik antar dua benda tersebut dapat dianalogkan dengan tarik menarik antar dua pusat wilayah yang bermuatan jumlah penduduk, atau antar produsen dan konsumen.

Model gravitasi sederhana dilandasi pada asumsi bahwa interaksi antara 2 pusat wilayah mempunyai hubungan proporsional langsung dari pusat-pusat yang bersangkutan dan mempunyai hubungan proporsional terbalik dengan jarak antar pusat-pusat tersebut

Interaksi antar pusat wilayah satu dengan pusat wilayah yang lain, menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak disebuah tempat tertentu, sedang para pelanggan tersebar dengan pelbagai jarak di sekitar produsen.

$$I_{ij} = \frac{P_i \cdot P_j}{(D_{ij})^2}$$

- I_{ij} = Interaksi antara tempat i dan j
- P_i = Jumlah penduduk di tempat i
- P_j = jumlah penduduk di tempat j
- D_{ij} = jarak antara tempat i dan tempat j

Analisis gravitasi dapat dipakai untuk memperoleh gambaran hubungan antar pusat kegiatan (kecamatan) di wilayah Sintang, yang berupa kuat atau lemahnya hubungan antar pusat kegiatan tersebut. Kuat – lemahnya hubungan antar pusat kegiatan akan menjadi masukan dalam prioritas indikator pembangunan infrastruktur .

5. Teori Basis Ekonomi (Economic Base)

Dalam perekonomian regional kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua sektor ; kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa keluar wilayah. Kegiatan bukan basis kegiatan yang menyediakan barang kebutuhan lokal. Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama perubahan yang mempunyai efek multiplier.

Koefisien lokasi suatu industri dapat dihitung dari rasio sbb:

$$LQ = \frac{\text{Persentase tenaga kerja regional dalam industri A}}{\text{Persentase tenaga kerja Nasional dalam industri A}}$$

Rasio yang lebih besar daripada 1 ($LQ > 1$) menunjukkan kegiatan ekspor atau basis.

Teori basis ekspor merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor permintaan luar dalam pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan ekstern dari wilayah luar.

Teori ini memandang tingkat tingkat permintaan luar terhadap produk dari industri ekspor suatu daerah sebagai penentu yang strategis bagi pertumbuhan wilayah.

Multiplier basis ekonomi biasanya dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan dan dapat dirumuskan sebagai berikut ;

$$K = \frac{\text{Jumlah total tenaga kerja basis dan bukan basis}}{\text{Jumlah total tenaga kerja basis}}$$

Teori basis ekonomi mempunyai kepraktisan ; kesederhanaannya, mudah diterapkan, dapat menjelaskan struktur ekonomi suatu daerah. Teori ini dapat juga berfungsi sebagai titik tolak yang penting bagi model-model penetapan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sintang, yang berupa PPL atau pusat-pusat desa Agropolitan.

6. Teori Pertumbuhan Wilayah (Teori Sektor)

Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah **teori sektor** teori ini timbul dari pengamatan empirik yang dilakukan oleh **Clark dan Fisher** bahwa kenaikan pendapatan per kapita di berbagai daerah pada berbagai waktu umumnya

- a. dibarengi oleh Relokasi SDM dengan penurunan proporsi angkatan kerja, yang dipekerjakan dalam kegiatan Primer (pertanian)
- b. dan kenaikan proporsi dalam kegiatan sekunder (manufakturing)
- c. dan disusul kenaikan proporsi dalam kegiatan tersier (jasa)

Laju terjadinya perubahan sektor seperti itu, dan evolusi spesialisasi dan pembagian kerja , dipandang sebagai sumber dinamika bagi pertumbuhan regional.

Dengan naiknya pendapatan, permintaan terhadap barang yang dihasilkan oleh sektor sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada permintaan terhadap produk primer, dengan demikian terjadi perubahan dari sektor yang imbalanya rendah ke sektor yang imbalannya tinggi. Teori ini dapat dipakai untuk mengetahui pusat-pusat desa yang telah berkembang menjadi daerah perkotaan, yaitu dengan melihat prosentase tenaga kerja yang bergerak di sektor jasa diatas 60 %.

7. Stages Theory (Teori Tahap)

Teori ini merupakan perluasan dari teori Sektor, teori tahap ini menyatakan bahwa perkembangan wilayah merupakan proses evolusi internal dengan tahapan sebagai berikut;

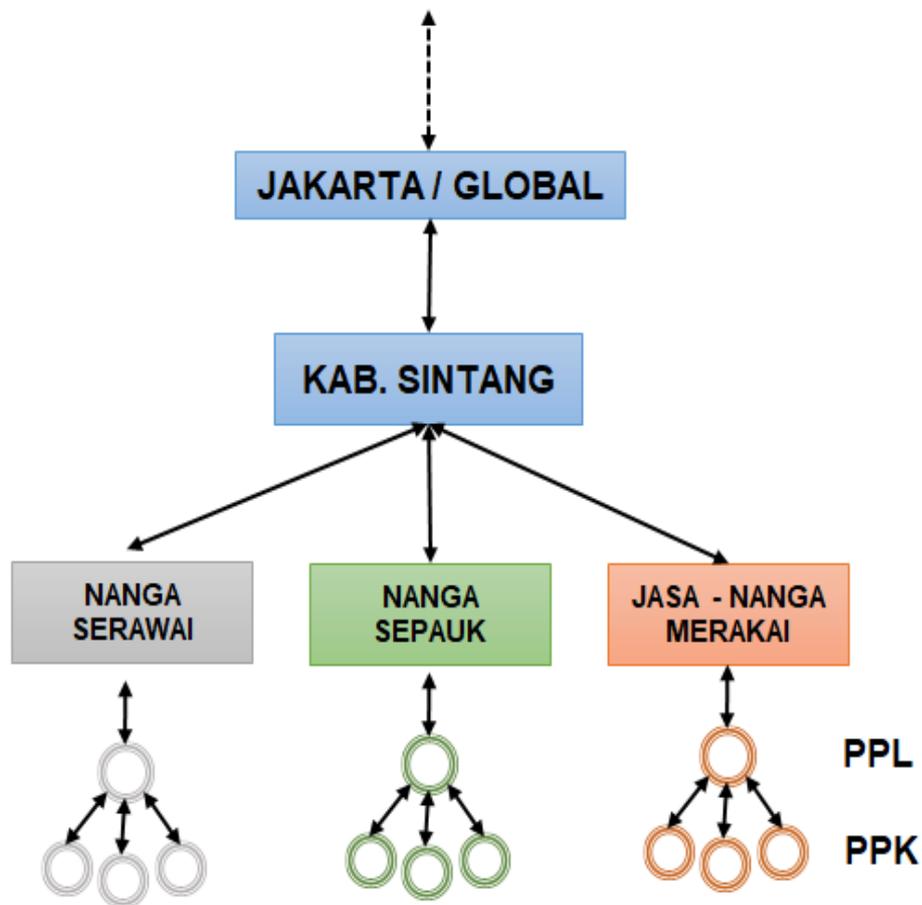
- a. Tahap pertama adalah merupakan tahap perekonomian subsisten swa-sembada, dimana hanya sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan penduduk pertanian terdistribusi menurut lokasi SDA.
- b. Dengan kemajuan Transportasi daerah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi. Munculah lapisan kedua yang membuka industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar dan tenaga-kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.
- c. Dengan semakin bertambahnya perdagangan antar wilayah, daerah bersangkutan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian ke tanaman bijian dan penanaman buah-buahan, dari penggembalaan ekstensif ke peternakan intensif.
- d. Dengan makin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya tanaman hasil pertanian, daerah yang bersangkutan terpaksa melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula mula mengolah produk primer kemudian semakin lebih berspesialisasi. (kalau industri merosot, menurun taraf hidup dan kemerosotan umum.
- e. Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi ekspor. Daerah yang berkembang seperti itu akan mengeksport ketrampilan dan jasa yang bersifat khusus ke daerah yang kurang berkembang.

Teori pentahapan dipakai untuk memperoleh gambaran secara umum wilayah kabupaten Sintang, wilayahnya dapat dikategorikan tahap awal subsisten, tahap pengembangan industri, atau tahap akhir industri tersier.

8. Penjalaran Pembangunan Dalam Hirarki Kota

Kutub pertumbuhan menjadi konsep yang praktis bagi para perencana kota dan wilayah untuk merencanakan aspek tata ruang kota dan wilayah. Selanjutnya proses penjalaran pembangunan di jelaskan oleh **Friedman**, bahwa suatu **core region** berlokasi dalam suatu hierarki dari suatu sistem ruang. Sistem ruang ini dimulai dari skala negara, propinsi dan kabupaten. Wilayah pengaruh dari **core region** (pusat wilayah) bergantung pada lingkup pusat wilayahnya. Dalam skala propinsi, core ini dapat berupa kota Propinsi/Kabupaten. Jadi jelas terdapat hierarki dari core wilayah. Core wilayah secara sistematik menjalarkan inovasi wilayah pinggiran. Jadi dengan kata lain penjalaran inovasi berjalan menurut hirarki core wilayahnya (Friedman 1982;96-97).

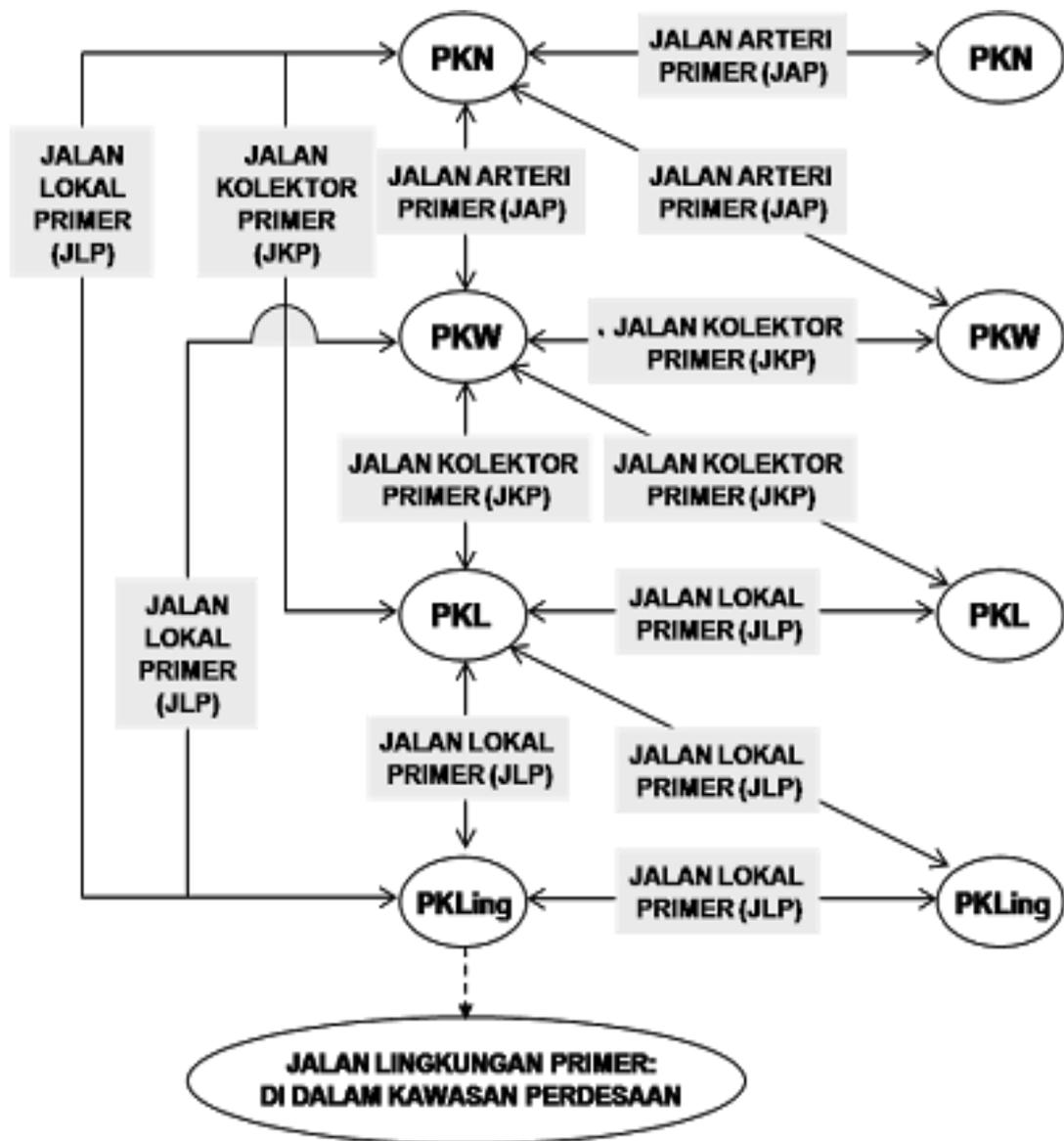
Pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh penjalaran pembangunan kota Pontianak. Kemudian dari Kota Sintang yang merupakan core wilayah Kabupaten Sintang, pembangunan menjaral ke wilayah-wilayah strategis dan pusat-pusat kegiatan. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2. Hirarki Kota dan Penjalaran Pembangunan

Perkembangan penjalaran pembangunan perkotaan, membutuhkan infrastruktur yang merupakan sistem jaringan jalan terkoneksi. Keterhubungan tersebut harus dapat menjangkau seluruh wilayah, dari pusat kota hingga wilayah perdesaan.

Perkembangan di Kabupaten Sintang telah menunjukkan adanya keterhubungan antar seluruh wilayah, namun demikian kualitas infrastruktur masih kurang memadai. Secara diagramatis keterhubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Hirarki Fungsi Jalan Pada Sistem Jaringan Primer

Keterangan:

- PKN : Pusat Kegiatan Nasional
- PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
- PKL : Pusat Kegiatan Lokal
- PKLing : Pusat Kegiatan Lingkungan

REKOMENDASI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SINTANG

Rekomendasi Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang Kabupaten Sintang dalam konteks teoritis dikemukakan sebagai berikut.

- (1) **Pusat pertumbuhan**, menyatakan bahwa pengembangan wilayah inti yang mempunyai kecenderungan pertumbuhan tinggi, ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dengan maksud untuk menciptakan pertumbuhan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang melalui *trickling down effect* yang ditimbulkannya.

Sesuai hirarkinya, sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kota Sintang dan sekitarnya (Sintang Raya). Selain itu perlu pengembangan pusat (hirarki) dibawahnya untuk memperluas wilayah *hinterland* dari wilayah inti tersebut, sehingga perkembangan tidak hanya terpusat di pusat kawasan itu saja, maka diperlukan perluasan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau seluruh kawasan potensial di wilayah Kabupaten Sintang, terutama kawasan pusat-pusat ekonomi perkebunan, tambang, permukiman lainnya.

- (2) **Pengembangan pusat pertumbuhan baru** sebagai *counterpoles*, yaitu wilayah yang berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan serta posisi geografisnya berpeluang menjadi pusat pertumbuhan sub wilayah. Pentingnya keberadaan pusat baru ini untuk lebih menjamin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang, melalui perluasan pelayanan ke kawasan-kawasan pedalaman dan terisolir yang memiliki potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Dengan demikian produktivitas kegiatan usaha tidak hanya terpusat di wilayah inti saja tetapi meluas ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Perluasan pelayanan ke wilayah pedalaman dan terisolir dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas ke wilayah tersebut.

Pusat-pusat inti baru di wilayah Kabupaten Sintang, meliputi Kota Sepauk, (di barat), Kota Nanga Merakai (utara), Kayan Hilir dan Serawai di Bagian timur. Untuk menjamin bisa berperannya kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan sub wilayah, maka langkah awal yang dibutuhkan adalah pendanaan dalam biaya pembangunan dari pihak pemerintah dalam upaya lebih melengkapi sarana dan prasarana perkotaan di pusat inti baru tersebut dan perluasan jaringan transportasi, sehingga pihak swasta dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

- (3) **Pengembangan wilayah perbatasan** Kabupaten Sintang dengan Sarawak-Malaysia, yang meliputi Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Tujuan pengembangan wilayah perbatasan ini adalah untuk melayani kegiatan produksi wilayah tersebut melalui penyediaan fasilitas produksi, sistem pemasaran yang memadai serta pelayanan sosial ekonomi lainnya, sehingga dapat mencegah perdagangan ilegal dan tersedotnya sumberdaya alam ke wilayah Sarawak (Malaysia).
- (4) **Pengembangan distrik agropolitan**, sebagai media pembangunan perdesaan yang paling efektif mengingat Kabupaten sintang memiliki potensi agroindustri yang sangat potensial khususnya di sektor perkebunan, kehutanan dan jernih pertanian rakyat lainnya. Kawasan Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Dalam kawasan agropolitan terdapat integrasi spasial antara daerah penghasil bahan baku, sentra produksi, pusat industri pengolahan, dan pusat pemasaran regional.
- (5) **Pengamanan dan pemantapan kawasan-kawasan fungsi lindung**, mengingat makin meningkatnya penebangan kayu hutan ilegal beberapa tahun terakhir, yang bila tidak diantisipasi dapat menghambat terciptanya *Sustainable development* di wilayah Kabupaten Sintang. Meningkatnya penebangan kayu ilegal, dikhawatirkan akan merusak

sistem ekologis keseluruhan wilayah Kalimantan, mengingat besarnya potensi hutan lindung wilayah ini. Kawasan-kawasan lindung yang dimaksud disini, meliputi kawasan yang berfungsi melindungi kawasan dibawahnya, daerah resapan air, kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan yang berfungsi melindungi kawasan setempat seperti sempadan sungai dan kawasan danau serta mata air.

DAFTAR PUSTAKA

Budiharjo, Eko, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung.

Catanese, Anthony J. & James C. Snyder, *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.

Gosling, David & Maitland Berry, 1984, *Concept of Urban Design*, Academy Edition.

Lynh, Kevin, 1984, *The Image of The City*.